THE INDONESIAN Forum

Seri 122
Rabu, 30 Juli 2025
Rangkuman DISKUSI

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"

TEMA	**:**	**Kondisi Kesiapan dan Kerentanan: Perubahan Iklim Provinsi di Indonesia**
Pemateri	**:**	1. Putu Rusta Adijaya, Peneliti Bidang Ekonomi, The Indonesian Institute 2. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 3. Hendricus Andy Simarmata, Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia
Moderator	**:**	Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, Peneliti Bidang Sosial, The Indonesian Institute
Partisipan	**:**	Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

PEMBAHASAN

Acara Indonesian Forum Seri 122 dibuka oleh Adinda Tenriangke Muchtar, Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, yang menyampaikan konteks acara sebagai diseminasi tengah tahun kajian bidang ekonomi The Indonesian Institute tanggal 30 Juli 2025. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya telah diadakan tiga diskusi pendahuluan terkait inisiatif dan policy talks pada isu anggaran peradilan, kepentingan politik, dan program penanganan *stunting* .

Putu Rusta Adijaya membuka presentasinya dengan menegaskan urgensi perubahan iklim sebagai ancaman baik di tingkat global maupun lokal, yang ditandai oleh besarnya kerugian akibat bencana hidrometeorologi dan tekanan pada ekonomi daerah. Ia menjelaskan bahwa kajian ini mengemulasi indeks ND-GAIN yang mengukur kerentanan dan kesiapan menggunakan data proxy tahun 2023 dan proyeksi tahun 2025 untuk semua 34 provinsi. Dari hasil perhitungan, DKI Jakarta menempati posisi tertinggi dengan skor 69,53, berkat kesiapan ekonomi, tata kelola, inovasi, dan infrastruktur yang kuat, meski masih menghadapi tantangan dalam layanan ekosistem seperti tutupan hutan. Yogyakarta (DIY) menunjukkan kesiapan ekonomi yang baik, namun infrastruktur dan ekosistemnya perlu perhatian lebih lanjut. Jawa Barat, dengan rasio 0,428, mengalami ketimpangan sosial-ekonomi sehingga perlu sinergi pentahelix dan perluasan akses pasar bagi UMKM. Sementara itu, Jambi dan Papua masih tertinggal pada skor persaingan usaha dan akses modal UMKM, sehingga sangat memerlukan dukungan pendanaan, pelatihan, dan pengembangan infrastruktur digital. Untuk merespon temuan tersebut, Putu merekomendasikan agar pemerintah pusat menjamin transparansi regulasi dan memberikan insentif teknis bagi provinsi, memperkuat kolaborasi pentahelix, serta membangun dashboard evaluasi berkelanjutan dengan melibatkan ahli lintas disiplin.

Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa sekitar 80% bencana di Indonesia bersifat hidrometeorologi dan polusi serta degradasi keanekaragaman hayati turut memperparah dampak perubahan iklim. Ia mengusulkan bahwa sektor industri pengolahan, transportasi, energi, dan pengelolaan sampah perlu kebijakan khusus yang disesuaikan dengan pemetaan provinsi dan kota. Lebih lanjut, ia menguraikan konsep green leadership yang meliputi partisipasi warga, konservasi ruang hijau, inovasi teknologi, dan

perencanaan pendanaan yang terstruktur. Contoh-contoh inovatif dari daerah seperti EFT berbasis kinerja desa di Sulawesi Selatan, bank sampah dan bus sampah di Surabaya, larangan botol sekali pakai di Bali, serta tata kelola industri di Bekasi menjadi inspirasi model kebijakan. Di level pusat, Kemendagri bertugas menyelaraskan nomenklatur kegiatan lingkungan hidup dalam dokumen RPJMD, RKPD, dan APBD, memberikan supervisi teknis dan politis kepada kepala daerah, serta memonitor alokasi anggaran lingkungan dengan melibatkan pentahelix sebagai mitra edukasi.

Hendricus Andy Simarmata memaparkan pentingnya menerjemahkan indeks ND-GAIN global ke level subnasional agar mitigasi dan adaptasi dapat dijalankan secara terpadu. Ia menekankan perlunya proyeksi jangka panjang hingga 30 tahun ke depan untuk memetakan potensi kerugian dan biaya adaptasi di sektor pertanian, kelautan, kesehatan, dan ketersediaan air. Dalam kerangka pembangunan hijau, jasa lingkungan seperti penyediaan air bersih, pengaturan iklim, dan penyimpanan karbon harus diperhitungkan sebagai bagian dari ekonomi regional. Untuk tata ruang, ia mengusulkan konsep "climate-proofing" dengan mempromosikan kota kompak yang mendukung transportasi aktif, memanfaatkan solusi alami (*seawall*) dibandingkan struktur beton (polder), dan merancang kawasan yang mengurangi jebakan polusi. Dari sisi pembiayaan, ia menggali potensi blended finance berdasarkan PP 46/2017, skema KPBU, insentif fiskal, serta pasar karbon biru, terutama mangrove dan lamun, sebagai pendorong ekonomi biru. Akhirnya, ia menekankan pentingnya digitalisasi data iklim, kampanye gotong-royong, dan mainstreaming RPPLH untuk memastikan perencanaan kolaboratif lintas sektor berjalan efektif.

FORUM DISKUSI

1. **Pertanyaan:** Apakah dari pemerintah pusat lewat Kementerian Dalam Negeri sudah memiliki target khusus kepada kepala daerah? Bagaimana model evaluasi dan fasilitasi yang dikembangkan untuk mengukur dampaknya? Contoh kreatif funding untuk meningkatkan ecological fiscal transfer (EFT)?
   Jawaban: Kemendagri telah menetapkan nomenklatur sub-kegiatan lingkungan hidup (koordinasi sinkronisasi emisi GRK, mitigasi perubahan iklim, dsb.) yang harus diadopsi di RKA-SKPD. Target nasional NDC (2030/2060) diturunkan ke target lokal, namun saat ini panduan perhitungan baseline emisi provinsi masih disusun oleh Kementerian LHK; sosialisasi dan kolaborasi IPB telah dilakukan untuk baseline. Evaluasi melalui monitoring anggaran di APBD, sinkronisasi dokumen plan (RPJMD, RKPD), dan supervisi teknis serta politis oleh Kemendagri. Contoh kreatif EFT: alokasi dana desa berbasis kinerja ekologis (Maros 4% APBD desa), bank sampah dan transportasi berbasis sampah di Surabaya, regulasi larangan botol plastik di Bali .

2. **Pertanyaan:** Blueprint lima tahun ke depan yang disiapkan Kemendagri terkait mitigasi perubahan iklim, dan apakah green leadership/EFT akan masuk indikator SPM atau mengikat komitmen politik daerah?
   Jawaban: Roadmap sektoral disusun oleh Bappenas (Indonesia Climate Change Sektoral Roadmap) dan Kemendagri bertindak sebagai koordinator wilayah, memastikan dokumen perencanaan daerah mencantumkan NDC serta evaluasi berkala. Green leadership masih berbasis kebijakan administratif (Permen/Inmen/SK) dan dapat diusulkan masuk SPM, namun perlu koordinasi lebih lanjut dengan Bappenas untuk menjadikannya mandatory.

3. **Pertanyaan:** Dari sisi pemerintah daerah dan masyarakat sipil, hal apa yang paling krusial untuk difokuskan bersama untuk meningkatkan resiliensi perubahan iklim?
   Jawaban: Pembangunan framework bersama: membangun visi misi kepala daerah dan masyarakat yang berkelanjutan, literasi digital & keuangan iklim, serta edukasi generasi Z sebagai konstituen utama. Penguatan perencanaan kolaboratif (pentahelix) dan digitalisasi data untuk simetrik information. Fokus mitigasi–adaptasi terpadu sebagai satu kesatuan pengendalian risiko .

4. **Pertanyaan:** Apakah ada upaya mitigasi dari Putu terkait transisi energi (net zero emission) agar tidak memperlebar ketimpangan sosial ekonomi?
   Jawaban: Pertumbuhan ekonomi hijau sebaiknya disertai pelatihan green jobs yang menyasar wilayah perdesaan dan urban, menyesuaikan local wisdom, dan memastikan inklusi pelaku lokal . Kebijakan fiskal (insentif) diarahkan untuk pelaku bermodal kecil, akses modal, dan pendampingan UMKM agar ekonomi hijau dapat mengurangi, bukan menambah, ketimpangan.

5. **Pertanyaan:** Tantangan apa yang dialami pemerintah daerah dalam merespon kebijakan perubahan iklim, selain masalah anggaran?
   Jawaban: Politik pembangunan lima-tahun sekali: kepala daerah fokus pada visi kampanye, sehingga rencana jangka panjang sering terputus. Overload rencana: banyaknya dokumen perencanaan (RPJMD, RPPLH, rencana sektor lain) menyebabkan birokrasi kewalahan. Budaya akses non-government funding masih lemah; perlu bukti empiris dan persuasi kepada donor/pilahtropis agar aksi iklim berkelanjutan .

Closing Statement

Putu Rusta Adijaya

Menghimbau edukasi luas akan dampak perubahan iklim, ajakan aksi kecil namun berarti.

Bima Arya Sugiarto

Harapan kolaborasi lebih lanjut.

Hendricus Andy Simarmata

Pemulihan lingkungan adalah investasi ekonomi masa depan, dan optimisme kerja lintas sektoral.

Catatan :

1. ***Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum***
2. ***Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute".***

TERIMA KASIH ~